

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prioritas nasional dalam penggunaan aparatur pemerintah adalah Pengembangan Profesional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai negeri sipil profesional seharusnya membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan administrasi yang efisien. Mendidik dan melatih pegawai atau PNS yang sedang menjalankan pekerjaannya dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pelatihan mengacu pada proses mendidik dan mempersiapkan karyawan.

Diklat dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya otak dan kepribadian. Buat perbedaan konseptual antara pendidikan dan pelatihan, kata Notoatmodjo (2003). Pelatihan terutama difokuskan pada peningkatan kemampuan atau bakat karyawan saat ini yang telah memegang pekerjaan atau kegiatan tertentu, sementara pendidikan biasanya terkait dengan mempersiapkan personel potensial yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Sementara pelatihan lebih terfokus pada kegiatan yang harus diselesaikan, pendidikan lebih menempatkan orientasi atau penekanan pada pengembangan bakat yang luas. Pelatihan lebih menekankan pada kemampuan psikomotorik, sedangkan pendidikan menempatkan penekanan yang sama pada ketiga kemampuan (pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau psikomotorik). Akibatnya, pendidikan dianggap memiliki cakupan yang lebih luas daripada pelatihan. Akibatnya, konsep pendidikan dan pelatihan adalah satu dan sama.

Proses koordinasi belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan istilah pendidikan dan pelatihan, atau Diklat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101/ tahun 2000. Baik personel baru maupun veteran menerima pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk menutup "kesenjangan" antara permintaan peran dan keterampilan atau bakat personel. Selain itu, pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Lembaga atau instansi yang menyediakan pelaksanaan diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah aset perusahaan yang paling berharga dari semua sumber dayanya. SDM memegang tempat

penting di antara berbagai sumber daya yang dikendalikan oleh organisasi perangkat daerah; Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lain tidak dapat digunakan, apalagi dikelola untuk menghasilkan suatu produk, karena sumber daya manusia bergerak dan memungkinkan sumber daya lain berfungsi. BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satu Lembaga yang terakreditasi untuk penyampaian instruksi dan pelatihan untuk inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Fasilitas yang mendukung pencapaian informasi yang mendukung dan menumbuhkan pengetahuan diperlukan bagi sumber daya manusia karena mereka adalah pemilik, pengolah, pengelola, dan pengguna pengetahuan.

Menurut informasi dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak BPSDM dalam proses pelaksanaan diklat pasti ditemukannya kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan diklat seperti kesalahan dalam melaksanakan kegiatan dari pelaksanaan diklat, molornya waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pelaksanaan diklat, berpindahnya karyawan dari satu bagian ke bagian lain, kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan diklat karena biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat cukup besar dan kendala dalam pelaksanaan diklat yang dilakukan di era pandemi. Dampak dari kendala-kendala dan hambatan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan, namun karena peserta sering mengulur waktu kedatangannya kegiatan yang harusnya bisa diselesaikan dalam 1 (hari) dapat menjadi 2 (hari), dengan keterbatasannya panitia pelaksana kegiatan diklat kurang dapat terlaksana secara maksimal. Selain dampak waktu dan keterbatasannya panitia untuk mengkoordinir acara diklat, biaya juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan diklat karena kurangnya biaya berpengaruh pada kurang lengkapnya fasilitas yang disediakan pada instansi yang mendirikan diklat.

Menurut uraian yang diberikan di atas, penulis penasaran untuk mempelajari dan memahami proses pelaksanaan pelatihan dengan melakukan kuliah kerja praktek atau magang sebagai penerapan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan menuangkannya ke dalam bentuk laporan kerja praktek atau proposal magang dengan judul, yaitu **“Prosedur Pelaksanaan Diklat Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dari pelaksanaan diklat pada bagian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala dalam menyelenggarakan diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana proses evaluasi dan solusi dari terselenggarakannya diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di era pandemi?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Tujuan penulis melakukan kegiatan magang adalah:

4. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dari pelaksanaan diklat pada bagian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penyelenggaraan diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi dan solusi dari terselenggarakannya diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di era pandemi.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Manfaat yang diperoleh penulis selama kegiatan magang ini adalah:

7. Bagi penulis

Penulis dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan yang lebih luas, dan pengalaman di dunia pekerjaan yang akan dibawa dan dipraktikkan di dunia kerja.

8. Bagi perusahaan

Dapat meningkatkan citra perusahaan, dan dapat meringankan beban dan tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan tugasnya dengan kemampuan yang dimiliki penulis dan juga dapat terjalinnya hubungan dengan baik dari perusahaan dengan Universitas Andalas

1.5 Metode Penelitian

Penulis melakukan pengumpulan data (informasi dan keterangan) yang diperoleh melalui berbagai cara sebagai berikut:

1. Observasi

Karena teori observasi dapat digunakan dan dilakukan ketika proses jalannya magang di perusahaan dan dapat dilakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Penulis tanya jawab dengan pembimbing yang dapat memberikan ilmu dan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan topik laporan.

3. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data melalui penelitian pada objek yang menjadi sasaran pembahasan serta wawancara dengan berbagai pihak yang terkait penyempurnaan penelitian ini.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Jl. Jend. Sudirman No.51, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat yang dilaksanakan selama 40 hari.

1.7 Sistematika Penulisan

Perumusan dalam tugas akhir ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi bahan dalam kegiatan magang. Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang 6 (enam) sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, mamfaat kegiatan magang, tempat beserta waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teoritis yang memuat teori yang diperoleh dari materi perkuliahan, jurnal, maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat

dan dipilih oleh penulis.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah perkembangan, kondisi, budaya, ruang lingkup, serta struktur organisasi pada pemerintahan provinsi Sumatera Barat.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pembahasan yang terkait hasil dari kegiatan magang mengenai Penyelenggaraan Diklat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

